

**MELOKALKAN AGENDA GLOBAL: PERAN AKTOR DI DAERAH  
DALAM ADAPTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
(TPB) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI  
INDONESIA**

**NINO VIARTASIWI\***

Fakultas Humaniora

Universitas Presiden

\*Email: nino.viartasiwi@president.ac.id

**ABSTRACT**

*As a series of global agendas, the Sustainable Development Goals (SDGs) aim to become the compass for development throughout the world. Local governments are the spearhead of implementing SDGs at the local level. This study presents possible challenges faced by regional actors in localizing the global agenda to help local governments adapt the implementation of the SDGs. The purpose of this study is to draw lessons from the empirical experiences of actors in the regions in adapting to global goals at the local level without leaving the potential and uniqueness of the region. This study describes the case of local adaptation, especially the attitude of actors towards the SDGs experienced by three local governments in East Java Province, Indonesia, namely: Jember Regency, Bondowoso Regency and Situbondo Regency. The research method used is qualitative through in-depth interviews and literature study. The findings in this study are divided into two, namely a situation description of adaptation and challenges faced by actors in actualizing the SDGs in the local context. This study underlines that the efforts of local actors in adapting the SDGs have been adequate, but at the same time several challenges have been found such as the low understanding of the SDGs values from state apparatus, weak budget, political will of local actors, and local political dynamics.*

*Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs), Local Actors, Local Government*

## I. PENDAHULUAN

Sebagai agenda global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dibangun dengan maksud untuk bisa diaplikasikan secara universal. SDGs adalah serangkaian tujuan dan ambisi sebagai inti dari Agenda 2030 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

SDGs adalah ambisi pembangunan global yang kedua setelah Millenium Development Goals (MDGs) pada periode 2000-2015. Sebagian besar penelitian menyebutkan bahwa MDGs, sebagai agenda global pertama, telah gagal untuk mencapai tujuannya. Kegagalan tersebut dikarenakan MDGs sebenarnya bukan merupakan tujuan global dan lebih diarahkan ke negara-negara yang belum berkembang. MDGs justru memiliki fokus utama untuk mengurangi angka kemiskinan, serta kebutuhan mencari pembenaran bagi penyaluran bantuan pembangunan dalam konteks geopolitik pasca perang dingin dalam globalisasi neoliberal (Fukuda-Parr, 2016). Berbeda

dengan agenda MDGs, SDGs diupayakan sebagai agenda global selanjutnya yang digunakan untuk mengatasi kegagalan MDGs.

Sebagai wacana pembangunan universal, inklusif dan lebih komprehensif, SDGs menggaungkan harapan agar dunia bekerja sama menuju ‘masa depan jangka panjang bagi umat manusia’. Berangkat dari apa yang dikenal sebagai agenda Utara-Selatan, SDGs memiliki tujuh belas tujuan utama dengan semangat untuk melibatkan dan memberi manfaat bagi semua orang (*Leave no one behind*). Dalam tujuh belas tujuan tersebut, terdapat beberapa elemen pokok antara lain: tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat & sejahtera; pendidikan berkualitas; kesetaraan gender; air bersih & sanitasi layak; energi bersih & terjangkau; pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi; industry, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota & permukiman yang berkelanjutan; konsumsi & produksi yang bertanggungjawab; penanganan perubahan iklim;

ekosistem lautan; ekosistem daratan; perdamaian, keadilan & kelembagaan yang tangguh; serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Elaborasi tujuh belas tujuan utama tersebut diperdalam lagi dalam 169 target.

Meski demikian, tujuh belas tujuan dalam SDGs tetap dianggap ambisius serta masih terlalu kompleks untuk diukur (Satterthwaite, 2014). Karena kerumitan dan ambisi dari SDGs tersebut, keterlibatan yang lebih baik dari pemerintah lokal menjadi sangat penting (Satterthwaite, 2014). Pembangunan di daerah tidak terlepas dari peran aktor sebagai

perencana dan pengambil keputusan dan pelaksana.

Penelitian ini bermaksud menganalisis peran aktor lokal dalam mencapai SDGs di daerah. Aktor yang menjadi fokus penelitian adalah pimpinan daerah. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimana pimpinan daerah sebagai aktor lokal di tiga kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yakni: Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso, melakukan adaptasi SDGs di lima tahun pertama penetapan SDGs (2015-2020)? Tantangan apa saja yang dihadapi oleh aktor lokal dalam adaptasi pelaksanaan SDGs di daerah?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlunya keterlibatan nasional dan lokal yang lebih baik dan koheren dalam SDGs

Sebagai agenda global baru, SDGs berbeda dari MDGs dalam tujuan, konsep dan politiknya (Fukuda-Parr, 2016). Belajar dari kegagalan MDGs untuk mengatasi kemiskinan melalui pembangunan, absennya tata kelola dan dorongan politik adalah dua hal yang

ditengarai sebagai hal yang menjadi halangan dalam keberhasilan pembangunan (Boex, 2015). Untuk mencapai keberhasilan, SDGs mensyaratkan keterlibatan yang lebih inklusif di dalam negara itu sendiri dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat sipil, swasta, dan lainnya. Singkatnya, keterlibatan aktor tidak hanya terbatas pada keterlibatan pemerintah nasional

(Ansell et al., 2022; Fenton & Gustafsson, 2017; Guha & Chakrabarti, 2019; Siddiqi et al., 2020). Selain itu, SDGs membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang cermat untuk implementasinya di semua tingkatan, dari lokal hingga nasional (Ridwan et al., 2019; Rusli et al., 2020; United Cities and Local Government (UCLG), n.d.).

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa keterlibatan daerah atau lokal sangat dibutuhkan dalam adaptasi SDGs di daerah. Selain itu, koherensi antara program nasional dan lokal juga menjadi kunci pencapaian SDGs di tingkat lokal.

## **2.2 SDGs dalam konteks pembangunan daerah**

Dalam konteks pembangunan daerah, implementasi SDGs seyogyanya didasari oleh kekuatan di tingkat lokal. Untuk itu, diperlukan penyesuaian dalam tataran praktis berdasarkan konteks lokal dan pengalaman di tingkat lokal. Meski demikian, peluang dan tantangan dalam adaptasi SDGs muncul ketika pemerintah nasional dan daerah

hanya memilih tujuan yang seiring dengan rencana pembangunannya masing-masing (Global Taskforce of Local and Regional Governments, n.d.; Sánchez Gassen et al., 2018). SDGs diformulasikan sebagai rangkaian ketergantungan antara satu tujuan dengan tujuan yang lain (Fukuda-Parr, 2016), sehingga ketika hanya sebagian kecil saja tujuan-tujuan yang ada dalam SDGs diimplementasikan maka sangat mungkin akan memicu rangkaian kegagalan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa di tingkat nasional tujuan-tujuan dan target-target dalam SDGs telah terserap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 (Bappenas, 2020). Dalam pedoman teknis Bappenas untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) juga telah tercakup petunjuk program, kegiatan dan indikator pencapaian serta peluang dukungan pembiayaannya yang memandu daerah di tingkat provinsi untuk

melakukan adaptasi terhadap SDGs. RAD adalah salah satu dari tiga dokumen perencanaan yang sejalan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dua dokumen penting lainnya adalah Peta Jalan TPB/SDGs dan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs (Bappenas, 2017, 2020).

Bagaimana implementasinya di tingkat kabupaten/kota? Hingga lima tahun pertama implementasi SDGs (2015-2020), tidak banyak studi yang mempelajari konteks kabupaten/kota dalam adaptasi terhadap SDGs. Bereapa diantaranya adalah studi oleh Mutiarani dan Siswantoro (2020) terhadap level pencapaian SDGs di beberapa provinsi di Indonesia dalam kurun 2015-2016 menyatakan bahwa karakteristik daerah yang meliputi luasan wilayah, jumlah Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan mempengaruhi pencapaian target SDGs. Hanya saja, tidak dijelaskan alasan mengapa dan bagaimana ketiga karakteristik tersebut membawa pengaruh pada pencapaian

target SDGs. Studi lainnya yang menjadi *baseline* dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa mengukur kapasitas pemerintah daerah untuk tujuan nomor 1, 5 dan 7 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Studi ini berkesimpulan bahwa di tiga kabupaten tersebut terdapat tantangan kelembagaan dan pelaksanaan program/kegiatan SDGs (Perkumpulan Prakarsa, n.d.). Di luar studi-studi itu, kajian-kajian lain umumnya tidak membahas praktik implementasi SDGs di tingkat lokal terkait peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan aktor lokal.

Sementara itu, berdasarkan studi di negara lain, tantangan utama pelaksanaan pembangunan daerah terletak pada dukungan politik dari politisi lokal (Ansell et al., 2022; Masuda et al., 2012; Monkelbaan, 2019; Mutiarani & Siswantoro, 2020; Satterthwaite, 2014), karena seperti yang diungkapkan oleh Whaites bahwa “yang disebut mencapai tujuan adalah politis sekaligus teknis” merupakan hal yang niscaya terjadi (Whaites, 2016)

Melokalkan tujuan global merupakan tugas penting negara sebagai bagian dari komitmen terhadap kepentingan bersama dalam skala global. Karena tujuan-tujuan dalam SDGs secara inheren saling berkaitan maka implementasinya juga harus dilakukan secara simultan. Karenanya, implementasi SDGs memerlukan keragaman kegiatan dan keselarasan antara pendekatan bottom-up dan top-down dalam tata

### III. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Studi pustaka juga dilakukan sebagai data tambahan dan pembanding. Data primer yang digunakan merupakan hasil wawancara mendalam.

Studi pustaka digunakan untuk mendapat informasi tentang pengalaman negara *Global-South* dan kabupaten/kota lain terkait tantangan adaptasi SDGs dan peran aktor untuk menjembatani adaptasi. Bahan kepustakaan yang digunakan dalam studi adalah jurnal akademik dan laporan dari badan internasional atau nasional bereputasi. Bahan

kelola (Jiménez-Aceituno et al., 2020; Sánchez Gassen et al., 2018). Terbatasnya studi tentang praktek implementasi SDGs di tingkat lokal telah mengakibatkan kurangnya informasi identifikasi tantangan bagi peran pemerintah daerah dan aktor lain. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan dalam studi mengenai adaptasi SDGs di daerah, utamanya tentang peran actor.

pustaka digunakan terutama pada studi yang mempelajari perjalanan lima tahun pertama SDGs sebagai fokus dari penelitian ini. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga digunakan untuk mengkonfirmasi pernyataan aktor.

Wawancara mendalam dilakukan pada bulan September dan Oktober 2020, sesuai kurun waktu yang ditetapkan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap Bupati Jember Faida, kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Situbondo Tri Cahya Setianingsih dan kepala Bappeda Kabupaten Bondowoso Farida. Narasumber adalah pejabat daerah yang menjabat pada bulan dan tahun dilaksanakan penelitian. Selain itu, wawancara

juga dilakukan pada peneliti SDGs Center Universitas Jember yaitu Dewi Prihatini dan Luh Putu Suciati. Data dianalisis dengan menggunakan metode komparasi.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menemukan beberapa tema pembahasan sebagai berikut.

##### **4.1 Pemahaman SDGs sebagai tujuan dari agenda pembangunan**

Pembahasan dalam tema ini dibagi menjadi dua bagian yakni upaya aktor lokal serta penyesuaian dengan budaya lokal atau program daerah.

###### **1. Upaya aktor lokal**

Aktor lokal pengambil keputusan di tiga daerah penelitian telah memahami fungsi SDGs sebagai agenda pembangunan global yang sangat ideal. Kepala daerah telah memasukan nilai-nilai SDGs dalam visi-misi bupati secara tersirat dan dalam laporan pertanggungjawaban. Tiga

pejabat daerah yang menjadi narasumber penelitian ini semuanya adalah perempuan. Jika di Jember kepala daerah perempuan dipilih rakyat melalui pilkada, dua narasumber lain adalah pejabat yang dipilih oleh kepala daerah yang secara otomatis menunjukkan praktik yang sejalan dengan target 5.5 yakni “menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat”.

Mengenai SDGs sebagai agenda pembangunan, Kabupaten Bondowoso secara khusus menyatakan pemahaman keterkaitan antara SDGs dengan

MDGs sebagai pendahulunya. Pemerintah daerah telah berpengalaman memasukan MDGs dalam agenda pembangunan lokal melalui RPJMD. Meski demikian, narasumber mengakui bahwa pengukuran terhadap ketercapaian MDGs tidak dilakukan secara khusus sehingga keberhasilan atau kegagalan MDGs tidak terpetakan dengan jelas untuk digunakan sebagai pembelajaran dalam adaptasi SDGs.

Sebagaimana MDGs, adaptasi terhadap SDGs juga dituangkan dalam RPJMD. Untuk mengintegrasikan RPJMD kabupaten dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan adaptasi SDGs, Kabupaten Bondowoso bekerjasama dengan lembaga lain yaitu Universitas Brawijaya dan Universitas Jember. Kedua lembaga tersebut membantu daerah dalam menyusun RPJMD sejak dari awal pembentukan.

Sebagai daerah yang baru terentaskan dari predikat sebagai

daerah tertinggal di tahun 2019, pembangunan Bondowoso masih berkuat pada pengentasan kemiskinan. Akibatnya, program SDGs yang menjadi fokus adalah program terkait pengentasan kemiskinan.

Kabupaten Bondowoso merilis program Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Tape Manis) melalui Peraturan Bupati Nomor 42A Tahun 2019 yang selaras dengan SDGs nomor 1 (tanpa kemiskinan). Gerakan ini mengorganisir dana masyarakat melalui program paralel bernama Bondowoso Bersedekah. Tujuan kedua program ini adalah pembiayaan kebutuhan pengentasan kemiskinan yang tidak tercakup dalam APBD. Karena tidak menggunakan anggaran negara, akuntabilitas gerakan ini dilakukan oleh akuntan publik.

Implementasi SDGs lainnya adalah di pendidikan tinggi (target 4.3.). Kabupaten Bondowoso mengundang Universitas Jember untuk membuka kampus Bondowoso



dengan penyerahan aset pemerintah daerah senilai 45 miliar rupiah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) (Humas Universitas Jember, 2018). Kampus Universitas Jember diharapkan menjadi pengungkit pengentasan kemiskinan di Bondowoso.

Di Jember, kepala daerah sebagai aktor utama adaptasi SDGs beranggapan indikator dalam SDGs sangat membantu arah pembangunan daerah karena SDGs diformulasikan oleh para ahli pembangunan di tingkat global. Menurut Bupati Jember, implementasi SDGs dalam RPJMD berusaha diwujudkan dalam pembangunan yang berprinsip partisipatori dan inklusif. Salah satunya melalui peraturan bahwa lima belas komponen masyarakat harus hadir dalam Musrembang sebelum hasil Musrembang dapat diakui pemerintah kabupaten. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 tahun

2018, juga mengatur keterwakilan minimal 30 persen dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selaras dengan tujuan nomor 5 tentang kesetaraan gender.

Untuk memperdalam pemahaman adaptasi SDGs dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), Bupati Jember, Faida, menjadi salah satu dari sebelas perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengikuti training singkat “HAM dan TPB untuk pemerintah daerah” di Gwangju, Korea Selatan pada tahun 2019 (Localise SDGs, 2020). Jember juga menjadi tuan rumah festival HAM nasional pada November 2019 sebagai upaya belajar tentang pembangunan berperspektif HAM (Komnas HAM, 2019).

Upaya lain adalah dengan pencaanangan Smart City yang menurut Bupati Faida memiliki tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat (SDGs nomor 1: tanpa kemiskinan) dengan argumen bahwa kualitas

keputusan yang bagus memerlukan analisis yang baik dan basis data yang terpercaya. Smart City akan mengintegrasikan data yang diperlukan untuk pembangunan.

Dalam RPJMD-Perubahan 2016-2021 Kabupaten Jember, termuat target beasiswa bagi 5000 siswa (Pemerintah Kabupaten Jember, 2017) yang sesuai dengan tujuan SDGs nomor 4 tentang pendidikan berkualitas. Kabupaten Jember merealisasikan dengan beasiswa terhadap total 10.119 siswa pada periode 2017-2019.

SDGs juga dimanfaatkan sebagai branding oleh Kabupaten Jember seperti dalam program Kampung SDGs yang dideklarasikan di berbagai wilayah sejak 2019 (faktajember.com, 2019). Hanya saja menurut narasumber (Prihatini dan Suciati) kegiatan, indikator dan ukuran capaian kampung SDGs tidak terlalu jelas dan masyarakat desa sasaran juga tidak memahami

nilai SDGs sebagai tujuan pembangunan.

Sebagaimana Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo juga berkolaborasi dengan Universitas Jember dan Universitas Brawijaya dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, Situbondo juga dibantu oleh Dewan Riset Daerah (DRD), sebuah lembaga non struktural yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. DRD dibentuk sebelum SDGs dicanangkan, yakni pada tahun 2012, dan berada dibawah koordinasi Bappeda serta bertanggungjawab langsung kepada Bupati (Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2012).

Di dua kabupaten lainnya, Kabupaten Situbondo telah memasukkan deskripsi naratif mengenai SDGs di dalam RPJMD sebagai bagian dari isu strategis dalam dinamika internasional yang termaktub dalam bab 4 tanpa melakukan elaborasi lebih lanjut mengenai

nilai SDGs sebagai tujuan pembangunan (Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2016). Beberapa target dan indikator SDGs secara natural telah termuat dalam RPJMD Kabupaten Situbondo karena kesamaan dengan arah pembangunan Situbondo.

Sama halnya Bondowoso, Situbondo juga baru saja terlepas dari status daerah tertinggal pada 31 Juli 2019 berdasarkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Nomor 79 Tahun 2019. Sehingga persoalan pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus pembangunan Kabupaten Situbondo. Akan tetapi, Kepala Bappeda mengakui bahwa narasi dan diskusi khusus mengenai SDGs jarang dilakukan. Ketika Situbondo menyusun RAD SDGs, informasi telah disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pedoman.

Salah satu bentuk adaptasi Kabupaten Situbondo dalam SDGs adalah upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian melalui peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perda tersebut dimotivasi oleh kebutuhan mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah (Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2017). Meskipun perda tersebut tidak secara tersurat menggunakan SDGs sebagai narasi pertimbangan, akan tetapi nilai utama SDGs yakni pembangunan berkelanjutan telah tersirat dalam Perda.

## **2. Kekhasan daerah dan SDGs**

Keunikan karakteristik daerah dan budaya lokal dapat menjadi insentif tetapi juga tantangan adaptasi SDGs. SDGs menyatakan bahwa tujuh belas tujuan tersebut berkaitan dan

saling mempengaruhi. Dalam adaptasi SDGs di daerah tidak semua tujuan dalam SDGs dapat diaplikasikan. Salah satu alasannya adalah ketidaksesuaian geografis. Sebagai contohnya Kabupaten Bondowoso tidak mengimplementasikan tujuan ekosistem lautan karena Kabupaten Bondowoso tidak memiliki wilayah laut.

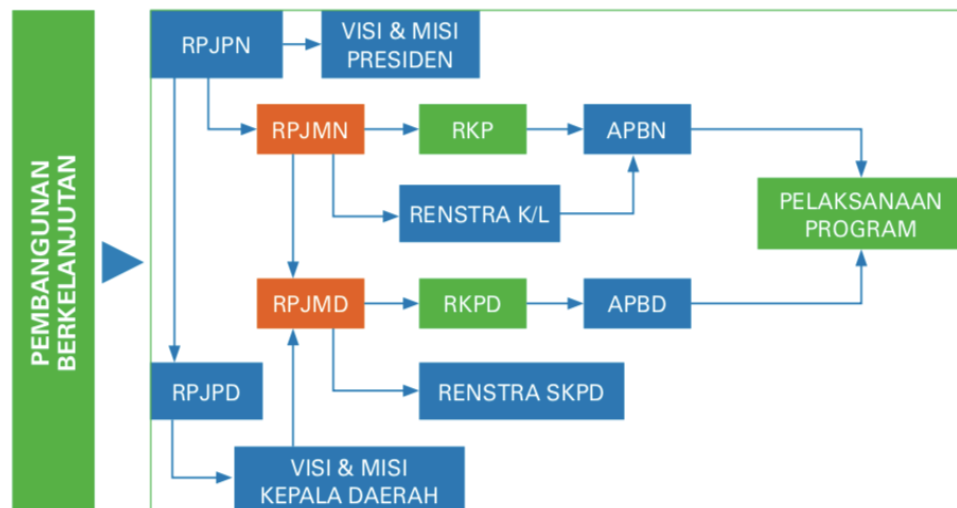
Sementara itu, kekhasan Situbondo terletak pada tantangan alamnya yaitu lahan yang tidak subur. Dari luas 163.850 Ha, berdasarkan atas distribusi penggunaan lahan pertanian tahun 2017 terdiri dari lahan sawah seluas 33.887 Ha dan lahan bukan sawah seluas 32.074 Ha (Sari et al., 2020). Persentase lahan marginal di Kabupaten Situbondo mencapai hampir 31 ribu hektar. Lahan marginal didefinisikan sebagai “lahan yang miskin hara, kelebihan atau kekurangan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur, tanah pasir, sulfat masam

dan gambut” (Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2017). Dalam adaptasinya terhadap program SDGs dan fokus pengentasan kemiskinan di daerah, Situbondo menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan lahan marginal yang terabaikan milik masyarakat untuk menanam Sorghum. Selain sebagai upaya alternatif sumber pangan selain nasi, Sorghum juga menjadi bahan baku industri yang dapat menjadi sumber pendapatan petani.

Dengan kekhasan kondisi geografis dan fokus pembangunan daerah pada pengentasan kemiskinan maka Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo tidak dapat mengadaptasi semua tujuan yang ada dalam SDGs. Hal berbeda terjadi di Kabupaten Jember yang memiliki karakteristik ekonomi yang lebih tinggi, temuan ini mengkonfirmasi studi yang dilakukan oleh Mutiarani & Siswantoro, (2020) yang

menyatakan korelasi antara luas wilayah, kesiapan perangkat daerah dan PAD dalam mengadaptasi SDGs. Aspek lain yang penting mendapatkan perhatian adalah budaya masyarakat dan rendahnya literasi masyarakat. Dua aspek ini membuat program SDGs menjadi sulit diterapkan di Bondowoso dan Situbondo. Menurut narasumber, gerakan

anti stunting di Bondowoso sangat terhambat oleh budaya masyarakat setempat. Budaya lain yang menjadi tantangan adalah kecenderungan masyarakat yang mudah terprovokasi. Budaya lokal yang mendukung SDGs adalah budaya gotong royong dan religius seperti kebiasaan bersedekah di masyarakat.



Gambar 1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) (Bappenas, 2017)

## 4.2 Tantangan

Penelitian di berbagai kabupaten/kota di Indonesia dan negara Global-South telah mengidentifikasi berbagai tantangan

adaptasi SDGs di tingkat lokal. Sebagian dari tantangan tersebut terkonfirmasi dalam riset ini.

## 1. Pemahaman perangkat daerah

Meskipun dalam proses adaptasi lokalnya sebagian target SDGs telah terserap dalam RPJMD, beberapa tantangan mengenai pemahaman ditemukan dalam penelitian ini. Salah satu tantangan yang ditemukan adalah ketidaksesuaian indikator dalam penilaian capaian SDGs. Narasumber dari SDGs Center Universitas Jember menyatakan aparaturnya daerah kebingungan menentukan indikator penilaian capaian sehingga seringkali menggunakan indikator capaian yang tidak relevan dengan kegiatan. Hal tersebut dikarenakan panduan pembuatan RAD hanya memberi pedoman pada indikator di tingkatan nasional dan provinsi, sehingga pemerintah kabupaten/kota hanya dapat menggunakan proksi dari indikator provinsi yang terkadang kurang relevan.

Sebagai contoh, pedoman RAD dari Bappenas untuk tujuan nomor 16, yaitu:

“perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh” menentukan 12 target dan 52 indikator capaian (Bappenas, 2017). Target No 16.3 yang berbunyi: “Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua”. Menggunakan enam indikator yang salah satunya yaitu nomor 16.3.1. yang berbunyi “Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik” (Bappenas, 2017). Tidak saja indikator ini memuat konsep “korban kekerasan” dan “resolusi konflik” yang perlu untuk didefinisikan secara praktis untuk dapat diukur.

Kapasitas pemahaman aparaturnya pemerintah daerah yang terbatas untuk melakukan pengembangan indikator capaian melalui proksi kegiatan juga menjadi tantangan utama dalam

adaptasi SDGs di tingkat lokal. Dalam RPJMD-Perubahan Kabupaten Jember 2016-2021, narasi yang memuat pemahaman mengenai SDGs belum termuat secara jelas. SDGs hanya disebut sebagai bagian dari isu strategis internasional pada bab IV dari RPJMD tanpa elaborasi lebih lanjut mengenai bagaimana isu strategis internasional ini diadaptasi dalam RPJMD dan indikator kinerja daerah (Pemerintah Kabupaten Jember, 2017). Temuan ini sejalan dengan temuan studi Nugraha tentang proses perumusan RAD daerah berdasarkan pada RPJMD 2016-2021 yang menemukan bahwa proses perumusan RAD Kabupaten Jember kurang maksimal karena kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai SDGs (Nugraha, 2019). Meskipun usaha pemahaman aktor utama di daerah yakni kepala daerah terhadap tujuan SDGs telah memadai, masih terdapat jarak antara penerimaan dan

pemahaman oleh aktor kepala daerah dengan dengan tataran rencana adaptasi secara praktis yang diformulasikan oleh aparat pemerintahan di Kabupaten Jember.

Pemangku kepentingan belum melihat target SDGs secara komprehensif dimana setiap target berkaitan dengan target lain sehingga pengukuran indikatornya juga terkait. Sebagai contoh, pada pengembangan infrastruktur sebagai target nomor 9.1. baru memasukkan indikator capaian yang bersifat angka pembangunan misalnya kondisi mantap jalan nasional (indikator 9.1.1.(a)) dan panjang jalur kereta api (indikator 9.1.1.(c)) pada capaian. Namun hal itu tidak melibatkan target lain misalnya yang berdampak capaian pembangunan infrastruktur, misalnya, target terkait pertumbuhan ekonomi (target 8.1.).

Sosialisasi terhadap OPD juga menjadi masalah tersendiri bagi adaptasi SDGs. Tidak saja

OPD tidak menguasai pemahaman SDGs terkait capaian dan indikator SDGs, juga pada penyesuaian SDGs dengan prioritas OPD sesuai dengan rencana strategisnya (renstra). Padahal OPD adalah pelaksana tugas yang akan menerjemahkan SDGs dalam praktik yang dapat diukur.

Lemahnya koordinasi dan ego sektoral antar lembaga juga menjadi tantangan. Lemahnya koordinasi juga terlihat pada capaian indikator yang meletakkan syarat kerjasama dengan institusi lain yang secara hirarkial tidak berada di bawah pemerintah daerah. Menurut narasumber dari SDGs Center Universitas Jember koordinasi dengan institusi lain masih lemah. Misalnya dengan kepolisian untuk data indikator capaian tujuan keadilan dan Perusahaan Listrik Negara untuk capaian tujuan pemenuhan energi.

Koordinasi data adalah persoalan yang mendasar dalam pengukuran capaian SDGs

karena tidak adanya tata kelola data yang terpusat. akibatnya, data tercecer di berbagai OPD. Selain itu, ego sektoral institusi juga menjadi tantangan kerjasama dalam konteks berbagi data. Prihatini menyatakan, tidak saja antar institusi enggan berbagi data aktual yang telah ada, mereka juga enggan berkoordinasi untuk melengkapi data yang dibutuhkan institusi lain pada periode/tahun berikutnya

## **2. Anggaran khusus SDGs**

Anggaran daerah yang terbatas juga menjadi salah satu tantangan utama implementasi SDGs. Kabupaten Bondowoso berusaha mengaktivasi keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan melalui forum CSR (corporate social responsibility) yang telah dimulai sejak 2016. Forum CSR dibentuk untuk periode 3 tahun melalui surat keputusan bupati dan programnya disinergikan dengan perencanaan. CSR membiayai program yang tidak mampu dibiayai oleh APBD



seperti pembuatan kloset di komunitas (Berita Bangsa, 2020). Meski demikian, kepala Bappeda mengakui dana CSR Bondowoso tidak terlalu besar karena perusahaan swasta di Bondowoso tidak banyak.

Kabupaten Jember melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membentuk Kampung SDGs yang tujuannya melakukan optimalisasi zakat di desa untuk kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tujuan nomor 1 yaitu tanpa kemiskinan (faktajember.com, 2019). Akan tetapi Bupati Faida mengakui bahwa program CSR di Jember belum optimal untuk mendukung program SDGs.

Kabupaten Situbondo juga melakukan hal yang sama dengan mengoptimalkan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR. Meskipun program CSR di Kabupaten Situbondo belum secara khusus dikaitkan dengan tujuan dan target SDGs dan baru dikaitkan dengan pembangunan prioritas daerah.

### **3. Dinamika politik daerah dan kemauan politik pemimpin daerah**

Tantangan pelaksanaan dan implementasi SDGs di daerah adalah kemauan politik (Satterthwaite, 2014). Semua narasumber menyatakan pendapat yang hampir sama.

Seorang narasumber yang juga seorang kepala daerah menyatakan bahwa sebagian besar kepala daerah memahami SDGs sebagai tujuan titipan dari pemerintah pusat tanpa adanya insentif atau benefit yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Tujuan dan target SDGs disematkan dalam RPJMD dan RAD namun tidak ada mekanisme khusus dalam pelaporan capaiannya. Pemerintah daerah memilih untuk lebih fokus pada kegiatan baku seperti membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

dibanding pada pencapaian SDGs.

Dinamika politik lokal juga mempengaruhi bagaimana SDGs diimplementasikan. Pada beberapa target, adaptasi nilai telah dilakukan di RPJMD. Tetapi pada implementasi praktik, dinamika politik menjadi hambatan seperti yang terjadi di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Beasiswa Kabupaten Jember yang termuat dalam RPJMD dan menjadi bagian dari SDGs, misalnya, mendapat kritikan terkait implementasinya yang dianggap menyimpang dari prosedur. Beasiswa yang dalam RPJMD menargetkan 5000 siswa, pada praktiknya menjangkau lebih dari 10000 siswa. Tetapi dinamika politik lokal menegaskan capaian tersebut (K Radio Jember, 2021). Di Kabupaten

Bondowoso, program Bondowoso Bersedekah yang ditargetkan sebagai mekanisme pembiayaan bagi program pengentasan kemiskinan yang dikenal sebagai Tape Manis melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, awalnya mendapat tantangan dari mitra pembangunan daerah Baznas. Baznas beralasan program Bondowoso Bersedekah akan mengkerdilkan peran Baznas sebagai lembaga pemerintah pengelola zakat (Radar Jember, 2021). Menurut Kepala Bappeda Bondowoso, di wilayah tapal kuda Jawa Timur—wilayah kawasan timur: Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo dan Probolinggo— aparat pemerintahan harus dapat melakukan sinergi kepentingan politik, kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktor daerah yakni kepala daerah dan pengambil kebijakan pembangunan seperti BAPPEDA sangat krusial dalam adaptasi SDGs di kabupaten/kota. Peran tersebut tidak terbatas pada pemahaman nilai SDGs tetapi juga pada kemauan politik untuk menerjemahkan SDGs dalam agenda pembangunan daerah, kerjasama dengan pihak lain, anggaran dan sosialisasi pada OPD.

Dalam konteks pelaksanaan adaptasi, pemahaman perangkat daerah dalam OPD sangat penting dalam fungsi koordinasi kinerja dan integrasi kinerja data SDGs.

Dinamika politik lokal yang terkait dengan hubungan antara

perangkat daerah dengan pemangku kepentingan juga menjadi penentu persepsi mengenai keberhasilan suatu capaian. Pada capaian indikator yang positif, persepsi bisa berubah menjadi negatif dalam situasi politik lokal yang tidak mendukung.

### 5.2 Saran

SDGs adalah agenda pembangunan global yang bersifat sangat ideal. Aktor daerah perlu meningkatkan kapasitas aparat daerah dalam pemahaman agenda ini melalui pelatihan khusus dan pendampingan para ahli. Peningkatan kapasitas perangkat daerah akan membuat adaptasi SDGs di daerah selaras dengan kondisi, tantangan dan keunikan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2022). *Co-Creation for Sustainability: The UN SDGs and the Power of Local Partnership*. Emerald Publishing Limited.
- Bappenas. (2017). *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi—Edisi II: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) (II)*. Kedeputian

- Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Berita Bangsa. (2020, January). *Guna Pembangunan MCK Ponpes, Sekda Bondowoso Arahkan Penggunaan CSR Perbankan* [News Portal]. Berita Bangsa. <https://www.beritabangsa.com/pemerintahan/guna-pembangunan-mck-ponpes-sekda-bondowoso-arahkan-penggunaan-csr-perbankan/>
- Boex, J. (2015). *A Post-2015 Local Governance Agenda*. Urban Institute. <https://www.urban.org/sites/default/files/publication/54196/2000263-A-Post-2015-Local-Governance-Agenda.pdf>
- faktajember.com. (2019, July 15). *Pemkab Dan Baznas Jember Luncurkan Kampung SDGs* [News]. Faktajember.com. <https://www.faktajember.com/pemkab-dan-baznas-jember-luncurkan-kampung-sdgs/>
- Fenton, P., & Gustafsson, S. (2017). Moving from high-level words to local action—Governance for urban sustainability in municipalities. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 26–27, 129–133. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.07.009>
- Fukuda-Parr, S. (2016). From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: Shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development. *Gender & Development*, 24(1), 43–52. <https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1145895>
- Global Taskforce of Local and Regional Governments. (n.d.). *What is the roadmap for localizing the SDGs?* Global Taskforce of Local and Regional Governments, UNDP, UN Habitat.
- Guha, J., & Chakrabarti, B. (2019). Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) through decentralisation and the role of local governments: A systematic review. *Commonwealth Journal of Local Governance*. <https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i22.6855>
- Humas Universitas Jember. (2018). *Universitas Jember apresiasi langkah pemkab Bondowoso dalam mengembangkan pendidikan tinggi*. Berita Universitas Jember. <https://news.unej.ac.id/universitas-jember-apresiasi-langkah-pemkab-bondowoso-dalam-mengembangkan-pendidikan-tinggi/>
- Jiménez-Aceituno, A., Peterson, G. D., Norström, A. V., Wong, G. Y., & Downing, A. S. (2020). Local lens for SDG implementation: Lessons from bottom-up approaches in Africa. *Sustainability Science*, 15(3), 729–743. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00746-0>
- K Radio Jember. (2021). *Pemkab Jember Tetapkan 4 Kategori Penerima Beasiswa Kuliah* [News Portal]. K Radio

- Jember. <https://www.k-radiojember.com/berita/read/pe-mkab-jember-tetapkan-4-kategori-penerima-beasiswa-kuliah>
- Komnas HAM. (2019, November). *Belajar HAM Lewat Budaya dalam Festival HAM 2019 di Jember*. Komnas HAM Republik Indonesia. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/11/19/1252/belajar-ham-lewat-budaya-dalam-festival-ham-2019-di-jember.html>
- Localise SDGs. (2020). *Kabar TPB* (Edisi 2) [Newsletter]. Localise SDGs. <https://localisedgs-indonesia.org/asset/file/newsletter/kabar-tpb-1912.pdf>
- Masuda, J. R., Teelucksingh, C., Zupancic, T., Crabtree, A., Haber, R., Skinner, E., Poland, B., Frankish, J., & Fridell, M. (2012). Out of our inner city backyards: Re-scaling urban environmental health inequity assessment. *Social Science & Medicine*, 75(7), 1244–1253. <https://doi.org/10.1016/j.socsci-med.2012.04.034>
- Monkelbaan, J. (2019). *Governance for the Sustainable Development Goals: Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-0475-0>
- Mutiarani, N. D., & Siswanto, D. (2020). The impact of local government characteristics on the accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs). *Cogent Business & Management*, 7(1), 1847751. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1847751>
- Nugraha, D. A. (2019). *Penyusunan Rencana Aksi Daerah Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kabupaten Jember)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Pemerintah Kabupaten Jember. (2017). *Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021*. Pemerintah Kabupaten Jember.
- Pemerintah Kabupaten Situbondo. (2012). *Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo*. Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- Pemerintah Kabupaten Situbondo. (2016). *RPJMD Kabupaten situbondo 2016-2021*.
- Pemerintah Kabupaten Situbondo. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Perkumpulan Prakarsa. (n.d.). *Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mencapai Tujuan SDGs No 1, 5 & 10: Baseline Study Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Perkumpulan Prakarsa.
- Radar Jember. (2021). *Baznas Sempat Tak Setuju Bondowoso Bersedekah* [News Portal]. Radar Jember. <https://radarjember.jawapos.co>

- m/berita-bondowoso/05/01/2021/baznas-sempat-tak-setuju-bondowoso-bersedekah/
- Ridwan, Wahyudi, B., & Susilawati, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Potensi Konflik Antara Imigran Timur Tengah Dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor, Jawa Barat [the role of local government in handling potential conflict between Middle Eastern immigrants and local communities in Cisarua, Bogor, West Java]. *Damai dan Resolusi Konflik*, 5(1), Article 1.  
<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/349>
- Rusli, Z., Adianto, & Mashur, D. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bingkai Otonomi Daerah*. Taman Karya.
- Sánchez Gassen, N., Penje, O., & Slätmo, E. (2018). *Global goals for local priorities: The 2030 Agenda at local level*. Nordregio.  
<https://doi.org/10.30689/R2018:2.1403-2503>
- Sari, S., Achmar, M., & Zahrosa, D. B. (2020). Strategi Optimalisasi Penggunaan Lahan Marginal Untuk pengembangan Komoditas Tanaman Pangan. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 4(2), 281–288.
- Satterthwaite, D. (2014). Guiding the Goals: Empowering Local Actors. *SAIS Review of International Affairs*, 34(2), 51–61.  
<https://doi.org/10.1353/sais.2014.0025>
- Siddiqi, S., Aftab, W., Siddiqui, F. J., Huicho, L., Mogilevskii, R., Friberg, P., Lindgren-Garcia, J., Causevic, S., Khamis, A., Shah, M. M., & Bhutta, Z. A. (2020). Global strategies and local implementation of health and health-related SDGs: Lessons from consultation in countries across five regions. *BMJ Global Health*, 5(9), e002859.  
<https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002859>
- United Cities and Local Government (UCLG). (n.d.). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah*. United Cities and Local Government (UCLG)-ASPAC.
- Whaites, A. (2016). *ACHIEVING THE IMPOSSIBLE: CAN WE BE SDG 16 BELIEVERS?* (GovNet Background Paper No. 2).  
<https://www.oecd.org/dac/accounstable-effective-institutions/Achieving%20the%20Impossible%20can%20we%20be%20SDG16%20believers.pdf>